

## PENGENTASAN KEMISKINAN: PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA

Ibrahim<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, [ibrahimali@ummat.ac.id](mailto:ibrahimali@ummat.ac.id)  
Email: [ibrahimali@ummat.ac.id](mailto:ibrahimali@ummat.ac.id)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pengentasan kemiskinan perdesaan di Indonesia menjadi tantangan, terutama disparitas kemiskinan desa dan kota. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai solusi strategis mendorong pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis BUMDes dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data semua BUMDes dan Desa di Indonesia. Pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan BUMDes, dan literatur akademik. Analisis data menggunakan deskriptif dan analisis tren. Analisis deskriptif dan analisis tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi tertinggi pada pendapatan rumah tangga mencapai 40 persen dan penciptaan lapangan kerja mencapai 25 persen. Berbagai tantangan dihadapi BUMDes dilapangan terutama pada aspek kelembagaan, manajerial, dan keterbatasan akses pasar. Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi manajerial dan optimalisasi teknologi digital mendukung akses pasar.

**Kata Kunci:** Pengentasan Kemiskinan, BUMDes, Ekonomi Lokal, Pemberdayaan, Infrastruktur.

**Abstract:** Alleviating rural poverty in Indonesia is a challenge, especially the disparity in rural and urban poverty. Limited access to infrastructure, basic services and economic opportunities. Village-Owned Enterprises (VOE) exist as a strategic solution to encourage village development. This research aims to analyze the role of VOE strategies in alleviating poverty in rural Indonesia. This research uses quantitative and qualitative approaches. Data collection for all VOE and Villages in Indonesia. Secondary data collection from the Central Statistics Agency (BPS), VOE annual reports, and academic literature. Data analysis uses descriptive and trend analysis. Descriptive analysis and trend analysis. The research results show that VOE provide the highest contribution to household income, reaching 40 percent and job creation reaching 25 percent. There are various challenges faced by VOE in the field, especially in institutional, managerial aspects and limited market access. The importance of strengthening institutional capacity, increasing managerial competence and optimizing digital technology to support market access.

**Keywords:** Poverty Alleviation, VOE, Local Economy, Empowerment, Infrastructure

---

#### Article History:

Received: 06-04-2022

Revised : 13-04-2022

Accepted: 15-04-2022

Online : 18-04-2022



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](#) license

## A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini, tingkat kemiskinan di desa mencapai 12,36 persen tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 6,56 persen. Perdesaan menjadi pusat konsentrasi penduduk miskin, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi. Ketergantungan masyarakat desa pada sektor agraris yang rentan terhadap fluktuasi harga dan iklim (BPS, 2023).

Pendekatan strategis mengurangi kemiskinan di perdesaan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi berbasis komunitas menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan ekonomi. Pendekatan ini memberikan solusi atas masalah kemiskinan, tetapi memberdayakan masyarakat desa memiliki kendali sumber daya. (Retnowati et al., 2022; Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Usaha berbasis komunitas mendorong terciptanya lapangan kerja lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

BUMDes merupakan salah satu inovasi kebijakan bertujuan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes dirancang sebagai entitas ekonomi dimiliki dan dikelola desa, tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. BUMDes memiliki fleksibilitas mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai potensi dan kebutuhan lokal, pengelolaan hasil bumi, jasa pariwisata, penyediaan kebutuhan dasar Masyarakat (2015, 2013; Hasbi et al., 2023; Syarifudin & Astuti, 2020).

Potensi BUMDes dalam pengentasan kemiskinan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama tata kelola sering kali belum optimal, termasuk rendahnya kapasitas manajerial pengelola BUMDes. Keterbatasan akses terhadap pasar lebih luas dukungan modal memadai menjadi kendala utama memastikan keberlanjutan usaha BUMDes. (World Bank, 2023), (Mahmuda et al., 2020), (Sofianto & Risandewi, 2021), (Ibrahim, 2023). Kendala menunjukkan intervensi kebijakan lebih terarah mengoptimalkan peran BUMDes menggerakkan ekonomi desa.

Penguatan BUMDes relevan mengingat tingginya kontribusi desa terhadap perekonomian nasional. Desa tidak hanya menjadi penghasil utama produk agraris, tetapi memiliki potensi besar sektor pariwisata dan kerajinan. Pengelolaan BUMDes menjadi motor penggerak memaksimalkan potensi sekaligus menciptakan ekonomi desa berkelanjutan (Hidayat et al., 2023; Ibrahim & Sutarna, 2018; Muslim et al., 2023). Penguatan melalui pelatihan manajemen, peningkatan akses pendanaan, serta pengembangan jaringan kemitraan bersama pihak swasta.

Keberhasilan BUMDes menekan angka kemiskinan bergantung dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Kolaborasi diperlukan menciptakan lingkungan kondusif pengembangan usaha BUMDes, sebagai penyediaan regulasi mendukung, infrastruktur memadai, serta pendampingan berkelanjutan. (Dewi, 2018; Ibrahim, 2018; Salim, 2022; UNDP, 2022). Tanpa sinergi potensi besar BUMDes mengentaskan kemiskinan berisiko

tidak dapat terealisasi secara optimal

Kompleksitas permasalahan kemiskinan di perdesaan dan potensi strategis BUMDes, diperlukan penelitian komprehensif untuk mengkaji peran BUMDes. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BUMDes dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan Indonesia.

## B. METODE PELAKSANAAN

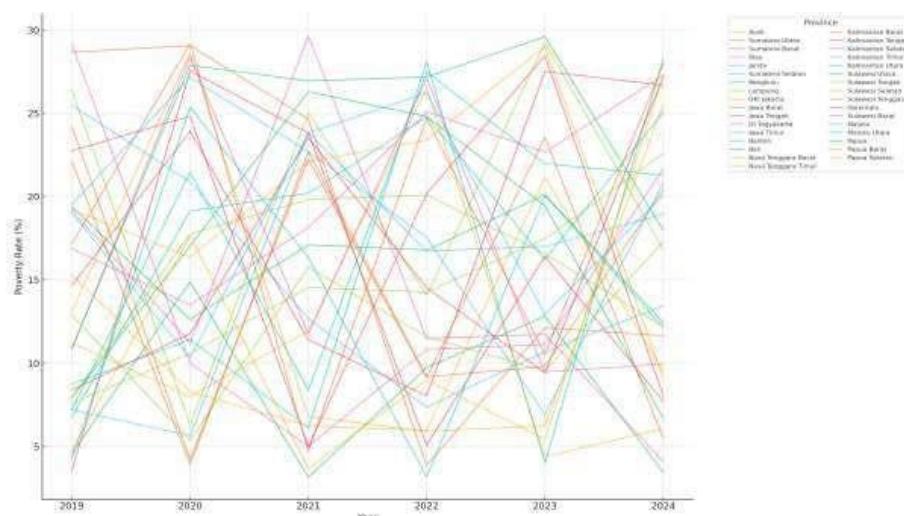
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di semua BUMDes dan Desa di Indonesia. Data dalam penelitian dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan BUMDes, dan literatur akademik. Analisis data menggunakan deskriptif dan analisis tren. Analisis deskriptif dari analisis literatur untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak program BUMDes dan analisis tren untuk mengidentifikasi tren dan pola kemiskinan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama pada perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019 hingga 2024, terdapat fluktuasi signifikan persentase penduduk miskin di berbagai provinsi (**Gambar 1**). Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan provinsi lain.

Tingkat kemiskinan provinsi Aceh dan Lampung menunjukkan penurunan beberapa tahun, tetapi mengalami lonjakan tahun tertentu. Provinsi Aceh angka kemiskinan sebesar 28,62 persen tahun 2020 menurun tahun 2023 mencapai 6,24 persen, namun meningkat tajam kembali tahun 2024 mencapai 25,55 persen. Begitu juga Provinsi Lampung mengalami fluktuasi tahun 2019 mencapai 26,39 persen dan tahun 2023 mencapai 29,24 persen sebelum turun tahun 2024 mencapai 16,83 persen.

Provinsi dengan akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Provinsi Papua Selatan dan NTT memiliki tantangan geografis dan struktural upaya pengentasan kemiskinan. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah, tetapi tetap menghadapi fluktuasi kenaikan tahun 2019 mencapai 19,23 persen menjadi tahun 2023 mencapai 28,99 persen sebelum kembali menurun.



**Gambar 1.** Kemiskinan di Indonesia, 2024

Pernyataan ini didukung penelitian (Agustina & Yahya, 2022; Andari & Ella, 2019; Saifuloh & Nursini, 2022) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor agraris rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Pentingnya diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan untuk mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan sektor Tunggal. Provinsi dengan dominasi sektor agraris cenderung menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam tingkat kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Penelitian diatas didukung World Bank ("The World Bank Annual Report 2020," 2020) menyoroti pentingnya program-program pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Efektivitas program masih menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas manajemen dan dukungan infrastruktur tidak merata. Meskipun ada kemajuan di beberapa provinsi Bali dan Jawa Tengah, keberlanjutan program belum sepenuhnya mampu menekan tingkat kemiskinan sepenuhnya (Ali et al., 2019; Girlin, 2022).

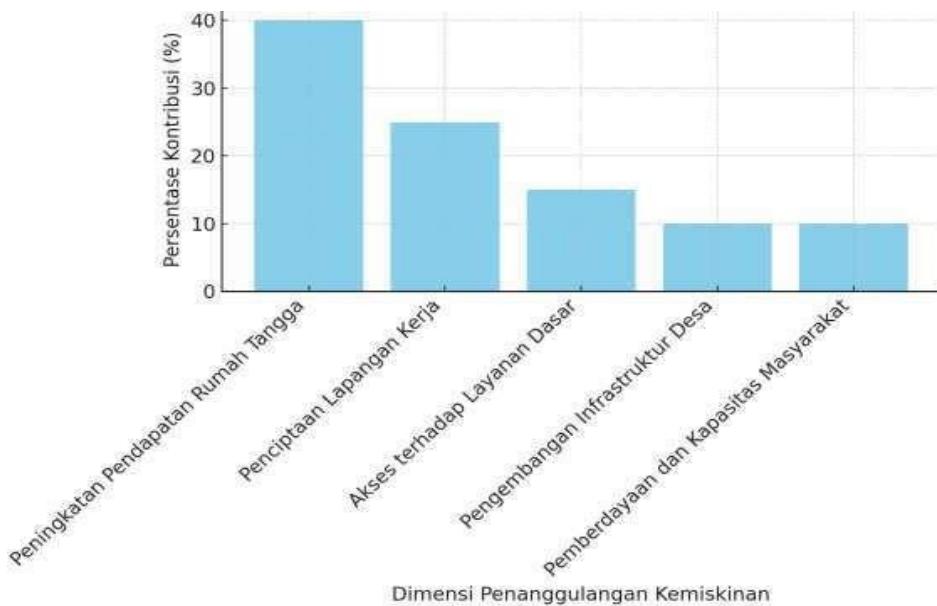
### **Peran BUMDes dalam Penanggulangan Kemiskinan**

BUMDes memiliki kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui lima dimensi utama: peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur desa, serta pemberdayaan dan kapasitas masyarakat. Analisis mendalam terhadap tiap dimensi menunjukkan bagaimana BUMDes menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi perdesaan. Dimensi peran BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Model Peran BUMDes dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Dimensi Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Kontribusi BUMDes	Deskripsi
Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga	40%	BUMDes memberikan sumber pendapatan tambahan melalui pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata.
Penciptaan Kerja	25%	BUMDes menciptakan peluang kerja bagi Lapangan masyarakat desa, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.
Akses terhadap Layanan Dasar	15%	BUMDes membantu menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui pendapatan dihasilkan, program CSR dijalankan BUMDes.
Pengembangan Infrastruktur Desa	10%	BUMDes berkontribusi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui jalan, sistem air bersih, dan fasilitas umum mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan dan Kapasitas Masyarakat	10%	BUMDes meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan, pendidikan

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2024



**Gambar 2.** Peran BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan

Kontribusi terbesar BUMDes pada peningkatan pendapatan rumah tangga mencapai 40 persen dampaknya berasal pengelolaan potensi lokal melalui UMKM (**Tabel 1 dan Gambar 1**). BUMDes memanfaatkan sektor unggulan melalui agribisnis, pariwisata desa, dan kerajinan lokal menciptakan nilai tambah.

Implementasi pada BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, sukses mengelola sektor pariwisata berbasis air. Melalui pengembangan destinasi wisata Umbul Ponggok, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Diversifikasi usaha ke sektor pengolahan hasil tani turut memberikan nilai tambah pada produk local lebih kompetitif di pasar global.

Penelitian terbaru dari (Ratnasari et al., 2023; Setyorini et al., 2023) menunjukkan bahwa desa dengan BUMDes aktif dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga 35 persen terutama melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan produksi. Tantangan mencakup rendahnya diversifikasi usaha dan kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital. Digitalisasi ekonomi desa masih menjadi kendala besar karena keterbatasan akses infrastruktur teknologi di perdesaan (Fitria et al., 2022; Lailiyah, 2022).

Kontribusi BUMDes Sebesar 25 persen terhadap pengentasan kemiskinan berasal dari penciptaan lapangan kerja. BUMDes membuka peluang kerja sektor lokal. Pelatihan keterampilan kerja disediakan BUMDes meningkatkan keterampilan teknis masyarakat desa melalui manajemen rantai pasok agrikultur dan kepariwisataan. BUMDes Mitra Sejahtera di Desa Gunung Masigit, Kabupaten Purwakarta, menunjukkan bahwa pengelolaan usaha peternakan sapi dan pengolahan susu telah membuka peluang kerja baru bagi lebih dari 150 orang. Pelatihan keterampilan kerja diselenggarakan BUMDes meningkatkan kemampuan teknis masyarakat.

Menurut laporan dari (The, 2023) menyebutkan bahwa desa memiliki program pemberdayaan ekonomi berbasis BUMDes mengalami penurunan tingkat pengangguran hingga 15% lima tahun terakhir. Namun, permasalahan terkait keberlanjutan lapangan kerja muncul ketika BUMDes memiliki model bisnis

fleksibel menghadapi fluktuasi pasar. Usaha berbasis pariwisata desa sangat rentan terhadap penurunan pengunjung akibat faktor eksternal terutama pandemi Covid 19 dan perubahan kunjungan wisatawan (Annas & Saprudin, 2023; Hafizhah et al., 2022).

Berbeda dengan layanan dasar memiliki kontribusi sebesar 15 persen. Diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan dasar terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. BUMDes menggunakan pendapatan usaha untuk mendukung program Corporate Social Responsibility (CSR) terutama pembangunan perpustakaan desa dan klinik kesehatan.

BUMDes Gemah Ripah di Desa Mangunan, Bantul, Yogyakarta, mengalokasikan sebagian keuntungan usaha untuk mendirikan fasilitas perpustakaan desa dan menyelenggarakan program literasi bagi anak sekolah. Langkah ini meningkatkan kualitas pendidikan di desa, menciptakan generasi muda terdidik dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penelitian oleh (Wijayanti et al., 2022) menyebutkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan desa dikelola BUMDes dapat meningkat hingga 20 persen lebih cepat dibandingkan desa tanpa BUMDes aktif. Kendala utama dimensi ini adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BUMDes, sehingga pengelolaan anggaran untuk program layanan dasar sering kali tidak optimal. Laporan dari (Kemendesa PDTT, 2020) menekankan perlunya sinergi kuat antara kebijakan lokal dan inisiatif BUMDes.

Kontribusi BUMdes mencapai 10 persen bidang Pengembangan Infrastruktur Desa dan pemberdayaan kapasitas Masyarakat. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan desa, saluran air bersih, dan fasilitas umum. Pada sektor pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi digital dan pendidikan berbasis komunitas.

Kontribusi bidang pengembangan infrastruktur ditemukan pada BUMDes Bersinar di Desa Banjaranyar, Jawa Timur, menggunakan pendapatan usaha memperbaiki jalan desa sebelumnya sulit dilalui. Infrastruktur baik, mobilitas masyarakat dan akses pasar bagi produk lokal meningkat akhirnya memperkuat perekonomian lokal. Kontribusi bidang pemberdayaan ditentukan pada BUMDes Sido Maju di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, berhasil menciptakan program pendidikan kewirausahaan melibatkan 200 peserta. Program mendirikan usaha kecil mandiri berkelanjutan secara langsung berdampak kemandirian ekonomi keluarga.

Rendahnya kontribusi BUMDes menunjukkan perlu peningkatan fokus dan kapasitas BUMDes mengelola proyek infrastruktur skala besar. Hambatan lainnya adalah alokasi dana terbatas dan ketergantungan Dana Desa, sering kali tidak mencukupi kebutuhan pembangunan mendesak (Mahamurah et al., 2019), (Falikhatur et al., 2019).

Pernyataan ini didukung penelitian oleh (Shifa & Ilyas, 2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis BUMDes mampu meningkatkan indeks kemandirian masyarakat hingga 15 persen. Laporan (OECD, 2023) menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung keberlanjutan pelatihan dan pendampingan. Program terhenti karena keterbatasan dana dan minimnya tenaga ahli lokal melanjutkan inisiatif tersebut.

## Tantangan dan Hambatan BUMDes

BUMDes terbukti memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal, tantangan menjadi kendala. Tantangan utama BUMDes pada aspek kelembagaan, manajemen, dan akses pasar. Aspek ini menjadi kunci keberlanjutan keberhasilan BUMDes mendukung ekonomi lokal.

Aspek kelembagaan menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan BUMDes. Mengingat memiliki kontribusi mencapai 40 persen terhadap hambatan operasional. Banyak BUMDes menghadapi kelemahan struktur organisasi tidak jelas, mekanisme pengawasan minim dan regulasi internal terstandarisasi. Mengakibatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Berbeda pada aspek manajemen BUMDes mencapai 35 persen dari hambatan utama. Banyak pengelola BUMDes memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan relevan pengelolaan usaha. Kemampuan pengelola dalam menyusun strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan pengelolaan risiko terbatas

Pada aspek pasar memperoleh kontribusi mencapai 25 persen. Banyak BUMDes kesulitan menjangkau pasar global.. Faktor utama keterbatasan minimnya jaringan distribusi, kurangnya promosi produk, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital Ketergantungan BUMDes pada sektor agraris membuat banyak BUMDes rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.

Tantangan terbesar BUMDes terletak pada aspek manajemen adalah fungsi pengawasan, aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan social (Devi et al., 2022), kelembagaan (RAHARJA, 2019; Tri Wahyuni & Ismail, 2021), pemasaran (Maesaroh et al., 2022), manajemen (Ariani Wulansari et al., 2021), (Ariani Wulansari et al., 2021) dan pemasaran (Danurwindo & Danurwindo, 2023; Hasanah et al., 2021).

## D. SIMPULAN DAN SARAN

BUMDes memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan perdesaan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur desa dan pemberdayaan dan kapasitas masyarakat. Peningkatan pendapatan rumah tangga memiliki kontribusi tertinggi mencapai 40 persen dan penciptaan lapangan kerja mencapai 25 persen. BUMDes banyak membantu kondisi ekonomi masyarakat desa. Tantangan dihadapi BUMDes dilapangan terutama pada aspek kelembagaan, manajerial, dan keterbatasan akses pasar. Pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pengelola, dan optimalisasi teknologi digital menjadi sorotan untuk mendukung keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari BUMDes.

BUMDes dalam pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis berbasis pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajerial, optimalisasi teknologi digital dan pengembangan infrastruktur pendukung. Pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pengelola, dan optimalisasi teknologi digital menjadi sorotan untuk mendukung keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari BUMDes.

## UCAPAN TERIMA KASIH:

Terima kasih disampaikan pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak desa sebagai penyedia data serta mampu memberikan manfaat dalam pengembangan

ilmu. Terima kasih juga pada mahasiswa yang membantu mengolah data, sehingga menjadi data lebih memiliki makna.

## DAFTAR RUJUKAN

- 2015, K. P. (2013). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Journal Of Chemical Information And Modeling*.
- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 98–108. <Https://Doi.Org/10.32630/Sukowati.V6i1.329>
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*. <Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Andari, R. N., & Ella, S. (2019). Developing A Smart Rural Model For Rural Area Development In Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41–58. <Https://Doi.Org/10.24258/Jba.V15i1.394>
- Annas, I., & Saprudin, D. (2023). Pemanfaatan Potensi Lokal Desa Simo Melalui Pengembangan Pariwisata Desa. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim)*, 5(1), 77–88. <Https://Doi.Org/10.29244/Jpim.5.1.77-88>
- Ariani Wulansari, N., Martono, S., Ranihuksna, D., & Ardiansari, A. (2021). Peningkatan Kualitas Manajerial Pengelola Bumdes Untuk Penguatan Organisasi Pada Tahap Infan. *Seminar Nasional Adpi Mengabdi Untuk Negeri*, 3(1), 119–129. <Https://Doi.Org/10.47841/Adpi.V3i1.250>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Badan Pusat Statistik - Kemiskinan Dan Ketimpangan*, 05, 3–7.
- Bps. (2023). *Profil Kemiskinan Di Indonesia. Berita Resmi Statistik*. 2023. Danurwido, M. A., & Danurwido, M. A. (2023). Marketing Mix Pada Cafe Bumdes Wonocempokoayu Sebagai Upaya Peningkatan Desa Wisata. *Jurnal Leecom (Leverage, Engagement, Empowerment Of Community)*, 5(1). <Https://Doi.Org/10.37715/Leecom.V5i1.3616>
- Devi, L. P. P. I., Suamba, I. K., & Arisena, G. M. K. (2022). Manajemen, Tantangan Dan Hambatan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). *Jurnal Hexagro*, 6(1), 22–36. <Https://Doi.Org/10.36423/Hexagro.V6i1.854>
- Dewi, Y. S. R. Dan M. (2018). Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Unesa*, 1(3), 3.
- Falikhutun, Wahyuni, S., Muthmainah, & Cholil, M. (2019). Model Pemberdayaan Usaha Kecil Menegah ( Ukm ) Berbasis Dana Desa. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume*, 2(1), 133–139.
- Fittria, A., Imron, A., Rusmadi, R., & Adzkiya', U. (2022). Optimalisasi Manajemen Sdm Dan Digitalisasi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 22(1), 51–66. <Https://Doi.Org/10.21580/Dms.2022.221.9687>
- Girlin, N. D. (2022). Ekonomi Partisipatif Dan Entrepreneurship Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Journal Economics And Strategy*, 3(2), 91–101. <Https://Doi.Org/10.36490/Jes.V3i2.431>
- Hafizhah, A., Theresiawati, T., & Warsuta, B. (2022). Sistem Informasi Pariwisata Badan Usaha Milik Desa Tirta Sejahtera Pada Masa Pandemi Berbasis Website (Studi Kasus: Wisata Desa Pluneng). *Informatik : Jurnal Ilmu Komputer*, 18(2), 113. <Https://Doi.Org/10.52958/Iftk.V18i2.4638>
- Hasanah, U., Muclisin, M., Ayuni, D., & Nurfita, U. (2021). Instrumen Penguat Bumdes Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Berkelanjutan Di Pedesaan Pada Masa

- Pandemi Covid-19 Di Madura. *Agriscience*, 2(2).  
<Https://Doi.Org/10.21107/Agriscience.V2i2.11951>
- Hasbi, I., Jamiat, N., Winarno, A., Hidayat, A. M., Syarifuddin, S., & Arwiyah, M. Y. (2023). Strategi Pengembangan Bumdes Wa Hyang Tarumajaya. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, 6, 1–17.  
<Https://Doi.Org/10.37695/Pkmcsr.V6i0.2183>
- Hidayat, R., Fadilah, R., Setiyani Putri, D., Nurkamilia, I., Yuliani, L., & Apriandi, M. W. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Di Desa Parungseah. *Jurnal Administrasi Perkantoran Dan Kesekretariatan*, 1(2), 74–79.  
<Https://Doi.Org/10.59820/Apk.V1i2.60>
- Ibrahim. (2018). Manajemen Badan Usaha Milik Desa. *Koloni*, 162.
- Ibrahim, I. (2023). Village Economic Development Strategies Through Sustainable Village-Owned Enterprises. The Gold Mining Area In West Sumbawa, Indonesia. *Romanian Journal Of Geography*. <Https://Doi.Org/10.59277/Rrg.2023.2.04>
- Ibrahim, & Sutarna, I. T. (2018). Management Of Village Business Enterprises In Improving Community Welfare Resilience Of Gold Mining Areas In Sumbawa Barat District Ibrahim 1 , Iwan Tanjung Sutarna 2. *Jurnal Tataloka*, 20(3), 309–316.
- Kemendesa Pdtt. (2020). Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Kemendesa Pdtt*, 73.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Ristek : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34.  
<Https://Doi.Org/10.55686/Ristek.V6i2.112>
- Maesaroh, R., Mahrus, M., & Yuliani, I. (2022). Pengaruh Strategi Pemasaran (Bauran Pemasaran 7p) Terhadap Kinerja Pemasaran Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kecamatan Muara Badak. *Borneo Islamic Finance And Economics Journal*, 227–244.  
<Https://Doi.Org/10.21093/Bifej.V2i2.5057>
- Mahamurah, D., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2019). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mahmuda, D., Al Zairani, W. O., Yati, K., & Lutkifli, L. (2020). Penyuluhan Mengenai Peran Penting Bumdes Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement And Emergence Journal (Ceej)*.  
<Https://Doi.Org/10.37385/Ceej.V2i1.143>
- Muslim, A., Ridlo, M. R., & Hakim, L. (2023). Pelatihan Digital Marketing Dan Pemberdayaan Usaha Kepada UMKM Dan Calon Wirausaha Muda Ntb. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(2), 53. <Https://Doi.Org/10.33394/Jdm.V1i2.7112>
- Oecd. (2023). Oecd : Revenue Statistics In Asia And The Pacific 2023. *Organisation For Economic Co-Operation And Development*, 1–197.
- Raharja, S. J. (2019). Prospek Dan Tantangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. *Dharmakarya*, 8(4).  
<Https://Doi.Org/10.24198/Dharmakarya.V8i4.16023>
- Ratnasari, E. D., Susilowati, I., & Maria, N. S. B. (2023). Small-Scale Vannamei Shrimp Farm Business Sustainability Analysis With Micmac: A Study On Kebumen Coastal Area, Indonesia. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(3). <Https://Doi.Org/10.26668/Businessreview/2023.V8i3.659>
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48.  
<Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.51.1.2022.40-48>
- Saifuloh, N. I., & Nursini, N. (2022). Dilema Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Sektor Pertanian. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(2), 102–108.  
<Https://Doi.Org/10.32528/Nms.V1i2.59>

- Salim, A. (2022). The Effect Of Village Community Economic Empowerment On Poverty Reduction In Rantau Bayur District Of Banyuasin Regency. *Nusantara Journal Of Behavioral And Social Sciences*, 1(2), 49–56. <Https://Doi.Org/10.47679/20229>
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Sukardi, P., Warsidi, Julialevi, K. O., Janah, M., Kemalasari, R. Y., & Dewi, A. D. W. K. (2023). The Strategy Of Promoting Effective Management And Accountability In Village-Owned Enterprises Through Governance. *Corporate And Business Strategy Review*, 4(4), 108–120. <Https://Doi.Org/10.22495/Cbsrv4i4art11>
- Shifa, I. N. L., & Ilyas, I. (2021). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jendela Pls*, 5(2), 76–87. <Https://Doi.Org/10.37058/Jpls.V5i2.2705>
- Sofianto, A., & Risandewi, T. (2021). Mapping Of Potential Village-Owned Enterprises (Bumdes) For Rural Economic Recovery During The Covid-19 Pandemic In Central Java, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 887(1). <Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/887/1/012022>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V10n2.P365-380>
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1). <Https://Doi.Org/10.33061/Rsfu.V4i1.3400>
- The, G. (2023). Studi Resesi Ekonomi 2023. *Efektor*, 7(2), 1–3.
- The World Bank Annual Report 2020. (2020). In *The World Bank Annual Report 2020*. <Https://Doi.Org/10.1596/978-1-4648-1619-2>
- Tri Wahyuni, E., & Ismail, D. (2021). Tantangan Institusionalisasi Dan Akuntabilitas Bumdes Di Tasikmalaya. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 74. <Https://Doi.Org/10.24198/Sawala.V2i2.27536>
- Undp. (2022). Undp Annual Report 2022: The Future Is. *Undp Publications*, 43.
- Wijayanti, D., Pratomo, W., & Fitri, H. S. (2022). Analisis Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 130–139. <Https://Doi.Org/10.21067/Jmk.V7i2.7405>
- World Bank. (2023). The World Bank In Cambodia. In *Worldbank.Org*.